



Evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat *Evaluation of the Family Hope Program in the village of Minta Kasih, Salapian District, Langkat Regency*

Yesi Artika Sitepu*, Abdul Kadir, Rosmala Dewi

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Medan
Area, Indonesia

Abstrak

Tujuan dari penelitian yaitu, untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat serta kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan. Hasil penelitian bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat belum optimal meskipun pihak Desa yang terkait dalam program sudah memberikan semua upaya yang terbaik untuk masyarakatnya. Tetapi kenyataannya ketidaktepatan sasaran masyarakat penerima program tersebut masih terjadi dimana perekonomian masyarakat yang berkecukupan mendapatkan PKH, padahal masih banyak masyarakat kurang mampu dan memenuhi syarat tidak mendapatkan program tersebut hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Desa Minta Kasih. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah kurangnya komunikasi antar masyarakat penerima manfaat dengan pihak pemerintah terkait dan banyak masyarakat tidak mampu dan memenuhi syarat PKH tidak menerima program.

Kata Kunci: Evaluasi, PKH, Kemiskinan

Abstract

The purpose of this research is to find out the description of the implementation of the Family Hope Program in the Village of Minta Kasih, Salapian District, Langkat Regency and the obstacles in implementing the Family Hope Program. The research method used in this study is a qualitative research method. Qualitative research is research about descriptive research and tends to use analysis. The theoretical foundation is used as a guide so that the focus of research is in accordance with the facts in the field. The results of the research show that the implementation of the Family of Hope Program in the Village of Minta Kasih, the Salapian District of Langkat Regency has not been optimal even though the villages involved in the program have given all the best efforts for their community. But in fact the inaccuracy of the target community of recipients of the program still occurs where the economy of people who are well-off receive PKH, even though there are still many poor and eligible people not getting the program, this causes social jealousy among the people of Minta Kasih Village. The obstacle faced in the implementation of the Family Hope Program is the lack of communication between the beneficiary community and the relevant government authorities and many communities are unable and eligible for PKH not receiving the program.

Keywords: Evaluation, PKH, Poverty

How to Cite: Artika Sitepu, Yesi. Kadir, Abdul. & Dewi, Rosmala. (2020). Evaluasi Program Keluarga Harapan Di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, Administrasi Publik, Ilmu Komunikasi (JIPIKOM)*, 1(1) 2019: 57-64,

*E-mail: yesartikasitepu@gmail.com



PENDAHULUAN

Kemiskinan adalah masalah serius yang dialami oleh sebagian negara di dunia. Kemiskinan tidak hanya terjadi di negara-negara kawasan Afrika, melainkan juga dialami di negara-negara kawasan Asia seperti di Indonesia. Menurut Jhingan dalam Didin (2010), menyatakan tiga ciri pertama negara berkembang yang menjadi penyebab dan sekaligus akibat yang saling terkait pada kemiskinan. Ciri pertama, prasarana dan sarana pendidikan yang tidak memadai sehingga menyebabkan tingginya jumlah penduduk buta huruf dan tidak memiliki keterampilan ataupun keahlian. Ciri kedua, sarana kesehatan dan pola konsumsi buruk sehingga hanya sebahagian kecil penduduk yang bisa menjadi tenaga kerja produktif dan ciri ketiga adalah penduduk terkonsentrasi di sektor pertanian dan pertambangan dengan metode produksi yang telah usang dan ketinggalan zaman.

Salah satu akar permasalahan kemiskinan di Indonesia yakni tingginya perbedaan golongan masyarakat, akibat tidak meratanya distribusi pendapatan sehingga kesenjangan antara masyarakat kaya dan masyarakat miskin di Indonesia. Kemiskinan tidak lagi hanya dianggap sebagai dimensi ekonomi melainkan telah meluas hingga dimensi sosial, kesehatan, pendidikan dan politik, Menurut UNDP dalam Cahyat (2004), adalah ketidakmampuan untuk memperluas pilihan-pilihan hidup, antara lain dengan memasukkan penilaian tidak adanya partisipasi dalam pengambilan kebijakan publik sebagai salah faktor kemiskinan (Suparman, N. Sakti, F.T. & Engkus, 2018).

Sementara itu, pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Masalah kemiskinan berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, budaya dan aspek lainnya. Pada dasarnya masyarakat miskin memiliki kelemahan dalam kemampuan mencukupi kebutuhan hidup serta kemampuan berusaha dan terbatasnya akses terhadap kegiatan sosial ekonomi sehingga tertinggal jauh dari masyarakat lain yang memiliki potensi lebih tinggi. Maka perlu adanya upaya untuk menanggulangi masalah kemiskinan dalam bentuk kebijakan berupa program-program kesejahteraan. Salah satu program untuk itu adalah Penyaluran Beras Miskin dan BPJS (Gowasa & Rironga, 2015; Suryani & Suharyanto, 2016; Hidayat, N., 2016).

Dalam rangka penanggulangan kemiskinan berbasis rumah tangga, pemerintah meluncurkan program khusus yang diberi nama Program Keluarga Harapan (PKH), Dimana yang telah sudah di atur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No.1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan. Dalam mempercepat upaya penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 pemerintah Indonesia telah melaksanakan Program Keluarga Harapan yaitu merupakan program lintas Kementerian Sosial Republik Indonesia (KEMENSOS), PKH adalah program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubahserta memutus rantai kemiskinan diutamakan bagi rumah tangga sangat miskin yang memiliki ibu hamil/menyusui, dan anak usia 0-15 tahun atau anak usia 15-18.

Untuk mensukseskan program tersebut, maka dibantu oleh Tim Tenaga ahli PKH dan konsultan *World Bank*. PKH telah dilaksanakan di berbagai negara, khususnya negara-negara Amerika Latin dengan nama program yang bervariasi. Namun secara konseptual, istilah aslinya adalah *Conditional Cash Transfers* (CCT), yang diterjemahkan menjadi Bantuan Tunai Bersyarat. Program ini “bukan” dimaksudkan sebagai kelanjutan program Subsidi Langsung Tunai (SLT) yang diberikan dalam rangka membantu rumah tangga miskin mempertahankan daya belinya pada saat pemerintah melakukan penyesuaian harga BBM. PKH dimaksudkan kepada upaya membangun sistem perlindungan sosial kepada masyarakat miskin.

Namun PKH ini tidak terlepas dari berbagai masalah, dalam pelaksanaannya yang dimana masih terdapat permasalahan dalam penentuan anggota penerima program dan pencairan dana yang seharusnya dilakukan dengan tepat waktu. Pada tahun 2015 Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat menerapkan program keluarga harapan, Berdasarkan observasi peneliti, pelaksanaan program keluarga harapan pada tahun 2018 di Desa Minta Kasih belum cukup maksimal dimana dalam proses pelaksanaan PKH masih terdapat permasalahan serta kendala yaitu ketidakmerataannya Keluarga Sangat Miskin/KSM yang mendapatkannya dan ketidaktepatan sasaran bantuan program Keluarga Harapan tersebut sehingga menimbulkan cemburu sosial. Adapun tujuan dari penelitian yaitu, untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat serta kendala-kendala dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara atau jalan yang ditempuh sehubungan dengan penelitian yang dilakukan yang memiliki langkah-langkah yang sistematis. Sugiyono (2017) menyatakan bahwa metode penelitian dapat diartikan secara ilmiah untuk mendapatkan dua yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga dapat digunakan untuk memahami, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi dilakukan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat Langkat dimana Kantor Desa Minta Kasih tersebut di Jl. Kuala-Bukit Lawang Sumatera Utara.

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Menurut Sugiyono (2017) bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan observasi wawancara, angket dan dokumentasi. Namun dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan melalui tiga metode, yaitu:

Observasi bertujuan untuk mengamati subjek dan objek penelitian, sehingga peneliti dapat memahami kondisi yang sebenarnya. Pengamatan bersifat non-partisipatif, yaitu peneliti berada diluar sistem yang diamati.

Wawancara mendalam (*indeep interview*) yang dilakukan kepada informan dengan cara melakukan tanya jawab atau percakapan langsung dengan seluruh sumber data yang ada berdasarkan daftar pertanyaan yang diajukan oleh peneliti sebagai panduan sumber data.

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental seseorang Sugiono (2017) Hasil penelitian yang bersangkutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai Evaluasi Program keluarga Harapan Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat dimana Program

Keluarga Harapan (PKH) merupakan program asistensi sosial kepada rumah tangga yang memenuhi kualifikasi tertentu dengan memberlakukan persyaratan dalam rangka untuk mengubah serta memutus rantai kemiskinan. PKH terdiri dari tiga komponen program yang dimana program bantuan sosial (Program Pendidikan, Program Bantuan Lanjut Usia, Program Bantuan Penyandang Disabilitas). maka peneliti hanya mengevaluasi satu komponen program yaitu program pendidikan.

Berbicara tentang pendidikan, masyarakat Desa Minta Kasih adalah salah satu desa yang sebahagian masyarakat yang berpendidikan terakhir adalah bertamatan SMA hal ini menyebabkan ketidakmeratanya jenis pekerjaan masyarakat Desa Minta Kasih yang dimana daftar sumber daya manusia sebagai berikut:

Tabel 4.8
Jenjang pendidikan masyarakat Desa Minta Kasih

No.	Uraian Sumber Daya Manusia	Jumlah	Satuan
1	Tingkat Pendidikan Masyarakat		
	<i>Lulusan pendidikan Umum</i>		
	<i>Taman Kanak-kanak</i>	0	Orang
	<i>Sekolah Dasar/ sederajat</i>	319	Orang
	<i>SMP/ Sederajat</i>	206	Orang
	<i>SMA/ Sederajat</i>	344	Orang
	<i>Akademi/ D1-D3</i>	6	Orang
	<i>Sarjana</i>		Orang
	<i>Pasca Sarjana</i>		
	<i>S1</i>	7	Orang
	<i>S2</i>		Orang
	<i>Lulusan pendidikan khusus</i>		
	<i>Pondok Pesantren</i>		Orang
	<i>Pendidikan Keagamaan</i>		Orang
	<i>Sekolah Luar Biasa</i>		Orang
	<i>Kursus Keterampilan</i>		Orang
	<i>Tidak lulus dan tidak sekolah</i>		
	<i>Tidak lulus</i>		Orang
	<i>Tidak bersekolah</i>		Orang
2	Jumlah Penduduk Miskin (menurut BPS)	201	Orang

(Sumber: Data Desa Minta Kasih diolah Peneliti Tahun 2019)

Dapat diketahui dari tabel di atas bahwa masyarakat Desa Minta Kasih sebahagian besar tingkat pendidikan terakhir adalah SMA dimana berjumlah 344 jiwa dan pendidikan terakhir SMP berjumlah 206 jiwa. Adapun data masyarakat penerima bantuan sosial di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tahun 2015-2018 yaitu berjumlah 62 orang. Untuk mendapatkan bantuan PKH ada beberapa komponen yang menjadi acuan atau syarat tertentu, Adapun kriteria komponen pendidikan dengan kriteria anak SD/MI atau sederajat, anak SMP/MTS atau sederajat, SMA/MA atau sederajat dan anak usia enam sampai 21 tahun yang belum menyelesaikan wajib belajar 12 tahun.

Evaluasi Program Keluarga Harapan Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat.

Evaluasi merupakan suatu kegiatan menilai sejauhmana keefektifan kebijakan tersebut sejauhmana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta menilai

kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam proses pelaksanaan kebijakan tersebut. Dalam melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan 6 (enam) indikator yang dikemukakan oleh William N Dunn dalam Riant Rugroho (2009). Menurut William N Dunn ada enam kriteria yang menjadi landasan Evaluasi kebijakan meliputi yaitu Efektifitas, Efisiensi, Kecukupan, Pemerataan/Kesamaan, Responsivitas, Ketepatan.

Efektifitas (*Effectiveness*). Efektifitas adalah salah satu indikator penting dalam kegiatan menilai atau mengevaluasi suatu kebijakan, apakah suatu kebijakan tersebut memberikan dampak kepada masyarakat penerima manfaat sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebagai tujuan utama program keluarga harapan. Adapun tujuan akhir atau hasil yang dicapai oleh Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih sendiri cukup sangat membantu biaya pendidikan anak masyarakat Keluarga Sangat miskin (KSM). Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan Kepala Desa minta kasih yaitu Bapak Teddy Sofianta Tarigan, SE dalam wawancara, bahwa: "Program Keluarga Harapan sangat membantu masyarakat yang tidak mampu serta membantu perekonomian masyarakat Keluarga Sangat miskin terutama dibidang pendidikan setelah kami lihat hasil dari PKH tersebut ialah turunya jumlah anak putus sekolah yang diakibatkan oleh biaya". Dari pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa hasil dari kebijakan Program Keluarga Harapan sudah sangat membantu biaya pendidikan masyarakat miskin.

Efisien. Indikator selanjutnya adalah efisien, indikator ini yang sangat berpengaruh dimana indikator berkenaan dari usaha selanjutnya yang diukur oleh moneter. Indikator ini berkenaan dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah berkenaan dengan biaya yang telah ditetapkan untuk membantu cukup untuk membantu biaya pendidikan formal anak masyarakat miskin. Menurut hasil wawancara Ibu Novika Sari selaku Kepala Urusan (Kaur) Kesejahteraan, menyatakan bahwa: "Sejauh yang saya ketahui total pertahun yang didapat masyarakat penerima sejumlah kurang lebih Rp 2.000.000-, ya menurut saya kalau untuk biaya pendidikan saja sudah cukup".

Pernyataan tersebut didukung pendapat Ibu Suheni selaku masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang menyatakan: "Jumlah bantuan dari Program Keluarga Harapan dengan pencairan tiga bulan sekali yang berjumlah Rp 500.000,- maka Dengan total bantuan satu tahun kurang lebih Rp 2.000.000-, jumlah tersebut menurut saya sudah sangat cukup untuk biaya anak sekolah".

Dari pernyataan tersebut, dapat disimpulkan yaitu efisiensi Program Keluarga Harapan tersebut cukup untuk membantu biaya pendidikan anak masyarakat penerima program.

Kecukupan (*Adequacy*). Indikator ini menyangkut hal-hal yang berkenaan dengan kendala-kendala yang dihadapi, dalam pelaksanaan program baik itu kendala yang dihadapi oleh pihak desa yang bersangkutan, maupun masyarakat penerima manfaat. Program akan berhasil apabila kendala-kendala yang dihadapi di tengah masyarakat diketahui sehingga dapat menjadi perbaikan terhadap pemerintah untuk merevisi kebijakan guna untuk manfaat yang diinginkan pemerintah. Pernyataan diungkapkan oleh bapak Teddy Sofianta Tarigan, SE. selaku Kepala Desa Minta Kasih, yaitu : "Kendala-kendala yang kita hadapi pada PKH 2018 ialah kurangnya kuota penerima Program dari jumlah yang didata, selanjutnya, kurangnya komunikasi masyarakat penerima dengan pihak desa".

Sejalan dengan hasil wawancara dengan Bapak Muhamad Chandra, menyatakan: "Kendala-kendala dalam proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan ialah terletak pada data masyarakat yang cukup lama serta terletak pada masyarakat penerima program tersebut. Dimana masyarakat berkomunikasi dengan kami selaku pemerintah

desa yang bersangkutan dengan Program Keluarga Harapan, sehingga terjadinya respon berlawanan dengan tujuan.”

Dari 2 (Dua) pernyataan bahwa kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaan Program keluarga Harapan Desa Minta Kasih yaitu terletak di pemerintahan pusat karena pemerintahan pusat yang melakukan memverifikasi data atau menentukan peserta Program Keluarga Harapan.

Pemerataan/Kesamaan (Equity). Indikator pemerataan/kesamaan berkenaan dengan pemerataan terhadap masyarakat penerima program, indikator ini sangat penting guna untuk melihat apakah masyarakat di Desa Minta Kasih mendapatkan program dengan merata sesuai dengan apa yang telah ditetapkan bahwa PKH diperuntukan untuk masyarakat miskin. Menurut Bapak Muhamad Chandra selaku sekretaris Desa minta kasih, menyatakan: “Yang berhak menjadi anggota PKH adalah masyarakat dengan kategori kurang mampu dan memiliki tanggungan anak sekolah wajib belajar. Belum merata, karena masih ada masyarakat miskin yang belum mendapatkan PKH dan ada juga masyarakat kaya yang mendapatkan PKH, hal ini disebabkan mereka yang sudah berkecukupan masih merasa tidak mampu. Ketidaktepatan ini juga kesalahan kami karena kami belum memperbaharui data masyarakat kami sehingga data yang kami kirim ke BPS adalah data tahun 2013. keadaan ekonomi masyarakat pada tahun 2013 tidak sama dengan keadaan ekonomi tahun 2018.”

Berdasarkan hasil wawancara diketahui tidak ketepatan sasaran terjadi, banyak masyarakat tidak mampu dan memenuhi syarat PKH tidak menerima program tersebut, dan sebaliknya masyarakat yang berkecukupan yang menjadi anggota PKH.

Responsivitas (Responsiveness). Responsivitas berkenaan dengan sejauhmana Program Keluarga Harapan dapat memuaskan dan memenuhi kebutuhan masyarakat penerima manfaat. Indikator evaluasi tersebut dapat menjelaskan sejauhmana hasil atau dampak yang dirasakan masyarakat dari kebijakan Program Keluarga Harapan tersebut. Responsivitas evaluasi Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih adalah sudah tidak adanya anak putus sekolah yang mempunyai kendala dalam pembiayaan. Masih dengan pernyataan Bapak Teddy Sofianta Tarigan, SE bahwa: “Sejak adanya PKH di desa masih masyarakat dapat memenuhi perlengkapan dan biaya sekolah serta tidak adanya kasus anak putus sekolah di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat ”.

Selaras dengan hasil wawancara dengan Ibu Priatni selaku masyarakat penerima manfaat menjelaskan, menyatakan: “Cukup dan sangat membantu karena semenjak dapat PKH biaya anak sekolah jadi ringan apalagi uangnya cair disitu juga waktu bayaran anak sekolah intinya Program Keluarga Harapan sangat sangat membantu kami selaku masyarakat miskin dalam membantu biaya pendidikan anak-anak kami”.

Dari wawancara diatas dapat kita ketahui bahwa hasil yang dirasakan oleh masyarakat penerima manfaat Program keluarga Harapan sudah sangat memuaskan.

Ketepatan (Appropriateness). Ketetapan berkenaan dengan nilai dari tujuan kebijakan Program Keluarga Harapan, masyarakat penerima manfaat atau masyarakat umum juga dapat melihat apakah nilai dari hasil kebijakan sesuai dengan pemerintah harapkan maupun masyarakat harapkan. Mengenai ketetapan dari hasil kebijakan Ibu Novika selaku kepala urusan (KAUR) kesejahteraan menjelaskan bahwa: “Menurut ibu PKH sudah memuaskan masyarakat penerimanya, hanya saja kuota untuk anggota PKH terbatas dan yang menentukan keanggotaan berada di pusat, sehingga masyarakat yang tidak mendapatkan program tersebut timbul kecemburuan sosial”.

Didukung dengan pernyataan Ibu Suhenim, masyarakat Penerima manfaat menyatakan bahwa: “Ya, kita tidak bisa banyak menuntut karena sudah dapat PKH dan

dibantu kayak gini sudah berterima kasih aja. Tapi saya sudah cukup puas oleh program ini karena semenjak adanya program keluarga harapan saya tidak terlalu khawatir soal biaya sekolah anak”.

Maka dari hasil wawancara dapat kita lihat, bahwa ketetapan dari Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih sudah cukup bagus sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018 Tentang PKH, tetapi pihak desa terkait mengharapkan bahwa pemerintah harus meningkatkan jumlah kuota atau peningkatan jumlah anggota baru penerima Program keluarga harapan.

Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian.

Setiap kebijakan-kebijakan yang di keluarga pemerintah tidak terlepas dari kendala-kendala, salah satunya dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih beberapa kendala yang dirasakan pihak Desa Minta Kasih yaitu kurangnya komunikasi masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan. Hal ini sesuai dengan pernyataan kepala bagian urusan Kesejahteraan Ibu Novika Sari yang menyatakan: “Kendala yang dihadapi kurang terbuka dan kurangnya komunikasi masyarakat penerima manfaat terhadap kami pihak desa, seperti kalau dana sudah cair tidak menginformasikan kepada kami”.

Pernyataan lain disampaikan oleh Ibu Suheni selaku masyarakat penerima manfaat Program Keluarga Harapan: “Kalau soal kendala yang ibu rasakan tidak ada, soalnya lancar-ancar saja untuk mencari info-info apalagi pendamping kami orangnya baik dan mengerti kalau anggota-anggotanya tidak cerdas”.

Serta banyak masyarakat tidak mampu dan memenuhi syarat PKH tidak menerima program tersebut, dan sebaliknya masyarakat yang berkecukupan yang menjadi anggota PKH. Pernyataan mengenai hal ini dikemukakan Ibu Jumini selaku masyarakat penerima manfaat, menyatakan bahwa: “Tidak merata karena yang ibu lihat ada yang rumah gedung, punya mobil dapat PKH padahal ini tetangga saya punya anak sekolah kehidupannya juga sama seperti saya gak dapat bantuan.”

Dapat kita ketahui bahwa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program keluarga harapan adalah kurangnya komunikasi antar masyarakat penerima manfaat dengan pihak pemerintah terkait dan banyak masyarakat tidak mampu dan memenuhi syarat PKH tidak menerima program.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian kualitatif dengan teknik observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat tentang Evaluasi Program Keluarga Harapan dapat di ambil beberapa kesimpulan bahwa dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Desa Minta Kasih Kecamatan Salapian Kabupaten Langkat belum optimal meskipun pihak Desa yang terkait dalam program sudah memberikan semua upaya yang terbaik untuk masyarakatnya. Tetapi kenyataannya ketidaktepatan sasaran masyarakat penerima program tersebut masih terjadi dimana perekonomian masyarakat yang berkecukupan mendapatkan PKH, padahal masih banyak masyarakat kurang mampu dan memenuhi syarat tidak mendapatkan program tersebut hal ini menimbulkan kecemburuan sosial di kalangan masyarakat Desa Minta Kasih. kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan adalah kurangnya komunikasi antar masyarakat penerima manfaat dengan pihak pemerintah terkait dan banyak masyarakat tidak mampu dan memenuhi syarat PKH tidak menerima program.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Evaluasi program Pendidikan: pedoman Teoritis praktis bagi mahasiswa dan praktisi pendidikan*, Bumi Aksara: Jakarta.
- Ayu, D, (2015). Virgrota, Nur, Ratih, Pratiwi, Suwondo. Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat, dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 2, No.12.
- Cahyat. (2004), *Bagaimana kemiskinan diukur? Beberapa model perhitungan kemiskinan di indonesia*, CIFOR (Center for international forestry research): November 2004.
- Didin, D. (2010). *Ekonomi Politik Dan Pembangunan Teori, Kritik dan Solusi bagi indonesia dan Negara Sedang berkembang*, Borgor: IPB Press.
- Djaali, P.M. (2007). *Pengukuran Dalam Bidang Pendidikan, Program Pascasarjana UNJ*: Jakarta.
- Gowasa, I., & Ritonga, S. (2015). Implementasi Program Raskin Untuk Membantu Perekonomian Masyarakat Miskin Di Kecamatan Tanah Masa Kabupaten Nias Selatan, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 3 (2): 97-111
- Hidayat, N., (2016). *Pengembangan Kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Rantau Selatan*, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (2): 120-130
- Huraerah, A. (2013). Strategi penanggulangan kemiskinan di indonesia, dalam *Jurnal Ilmu kesejahteraan sosial*, Vol, 12, No.1.
- Husni, M.A. (1993). *kehidupan sosial menurut islam*, Cet.keempat, Bandung: Diponogoro.
- Isbandi, R.A. (2003). *Pemberdayaan, penguatan Masyarakat dan Intervensi Komunitas (pengantar pada pemikiran dan pendekatan praktis)* edisi revisi, Lembaga Penerbitan FEUI: Jakarta.
- Kementerian Sosial. (2013). *Pedoman Umum Program Keluarga Harapan*, Direktorat Jaminan Sosial: Jakarta.
- Lestari, S. (2012). *Psikologi keluarga, Penanaman nilai dan penanganan Konflik Dalam keluarga*, Edisi pertama, Jakarta: Kencana.
- Listyaningsih, U. (2004). *Dinamika Kemiskinan di Yogyakarta, Analisa Data Hasil Survei Aspek Kehidupan Rumah Tangga Lndonesia*, cet. Pertama, Bulaksumur, G-7: Yogyakarta.
- Nugroho, R. (2009). *Publik Policy*, PT Elex Media Komputindo.
- Pengertian keuarga harapan, diakses pada 24 Oktober 2018 dari <https://allennellabercerita.wordpress.com/2013/04/30/program-keluarga-harapan-pkh>
- Pengertian kemiskinan menurut para ahli” diakses pada 22 Oktober 2018 dari <http://dilihatya.com/2146-kemiskinan-menurut-para-ahli>.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia. 2018. *Peraturan Menteri Sosial No.1 tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan*.
- Program Keluarga Harapan diakses pada 10 januari 2019 dari <http://www.kemsos.go.id/progam-keluarga-harapan>
- Robbins, C. (2007). *Managemen*. Edisi Kedelapan, PT indeks: Jakarta.
- Simanjuntak, A.B. (2013). *Harmonious Family*, Jakarta: Media Group.
- Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian, Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*: Alfabeta, Bandung. Tim Penyusun, 1995, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka: Jakarta.
- Suparman, N. Sakti, F.T. & Engkus (2018). Evaluasi Program KB pada Era Desentralisasi di Kuningan Jawa Barat. *JPPUMA: JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political UMA)*, 6 (2): 122-131
- Surat Keputusan Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Nomor 26/LJS/12/2016 tanggal 27 Desember 2016 tentang indeks dan komponen Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan
- Suryani, A.I., & Suharyanto, A, (2016). Implementasi Program Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Dalam Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kesehatan di Rumah Sakit Umum Sibuhuan Kabupaten Padang Lawas, *Jurnal Administrasi Publik Universitas Medan Area*, 4 (1): 86-
- Tisniwati, B. (2012). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia, dalam *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol.10 No.1*.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 6 Tentang Desa 2014